

Yogyakarta & Jawa Tengah

Mahatir: Penyulut Perang Layak Dikriminalkan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan gelar doktor kehormatan kepada Mahatir.

TEMPO/PIUS ERLANGGA

Iqbal Muhtarom

miqbal@tempo.co.id

BANTUL — Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan pelaku dan penyulut peperangan layak dikriminalkan dan diganjar hukuman karena telah membunuh secara massal. “Membunuh satu orang saja itu kriminal, apalagi membunuh jutaan manusia,” ujar dia, saat menerima gelar doktor *honoris causa* dalam bidang perdamaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemarin.

Gelar kehormatan tersebut diberikan atas upaya Perdana Menteri Malaysia periode 1981-2003 itu dalam mengkampanyekan seruan anti-perang selama 10 tahun terakhir. Sejak tidak lagi menjadi pemimpin pemerintahan di Malaysia, Mahathir aktif dalam gerakan perdamaian dunia. Ia turut menginisiasi pendirian Perdana Global Peace Foundation, sebuah organisasi yang mengkampanyekan isu perdamaian dan anti-perang pada akhir 2005.

Selama ini, menurut Mahathir, penguasa yang memenangi peperangan justru tercatat sebagai tokoh terhormat dalam sejarah. Padahal, kebesaran namanya didapat dari serangkaian aksi pembunuhan. Meski demikian, Mahathir optimistis seruan perdamaian dan kriminalisasi terhadap pelaku perang suatu saat akan didengar oleh publik dunia. Ia menganalogikan idenya dengan fenomena perbudakan, yang legal seka-



Tun Mahathir Mohamad (kedua kanan) menerima kalung tanda gelar Doktor Honoris Causa bidang perdamaian dan Islam di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemarin.

dilarang di hampir semua negara di dunia. “Mungkin ide kriminalisasi pelaku perang bisa diterima dalam 100-200 tahun lagi,” kata dia.

Mahathir mengeluhkan kegagalan dunia dalam menghentikan peperangan di Suriah, yang telah membuat ratusan ribu jiwa terbunuh dan jutaan orang mengungsi. “Kita harus bisa menemukan cara menghentikan perang agar peradaban manusia semakin beradab,” ujarnya.

Manajemen konflik yang menjauhi peperangan, menurut Mahathir, penting untuk didorong menjadi prinsip semua negara di dunia. Menurut dia, upaya

sanakan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Ia mencontohkan, sengketa perebutan klaim kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia bisa selesai lewat jalur persidangan Mahkamah Internasional. Negeranya juga menyelesaikan sengketa serupa dengan Singapura dan negara tetangganya yang lain. “Akan tetapi, metode ini efektif asal semua pihak sejak awal bersedia menerima apa pun keputusan Mahkamah Internasional,” kata dia.

Promotor pemberian gelar kehormatan bagi Mahathir, Bambang Cipto, menilai gagasan anti-perang layak mendapat

saat ini. Rektor UMY tersebut mengatakan kampusnya mendukung Mahathir karena isu penghentian perang bukan masalah sederhana. “Mahathir menyadari efek besar peperangan, sementara hambatan kriminalisasi perang rumit,” kata Bambang.

Pemberian gelar kehormatan tersebut telah disetujui semua anggota Senat UMY. Keputusan tersebut juga telah direkomendasikan oleh Tim Penilai Akademik Senat UMY, yang terdiri atas lima guru besar, yakni Bambang Cipto, Tulus Abadi, Ichlasul Amal, Syamsul Anwar, dan Heru Kurnianto Tjahjono.